

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berikut ini merupakan temuan studi yang ditemukan pada kawasan rawan bencana (KRB) yang meliputi 3 (tiga) desa yaitu Desa Mriyan, Desa Wonodoyo, dan Desa Samiran terkait infrastruktur penerangan jalan umum yang masing - masing terhubung dengan Kota Boyolali sebagai pusat pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan karakteristik fisik dan non fisik yang menyebabkan ketimpangan antara infrastruktur penerangan jalan umum di desa dan desa – kota pada kawasan rawan bencana. Perbedaan fisik terlihat dari hasil observasi dan analisis diskriminan. Sedangkan perbedaan manajemen pengelolaan terlihat dari bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur penerangan jalan umum.
- b. Berdasarkan hasil analisis diskriminan dengan menggunakan software SPSS yang melibatkan aspek fisik dan aspek energi yang terdiri dari 7 variabel, didapatkan bahwa variabel yang mempengaruhi perbedaan infrastruktur antara di desa dan desa – kota adalah variabel tingkat luminansi dan jenis lampu. Kedua variabel inilah yang merupakan variabel pembeda dalam klasifikasi infrastruktur PJU di koridor desa dan desa – kota pada kawasan rawan bencana.
- c. Terdapat 3 jenis klasifikasi infrastruktur PJU pada koridor rawan bencana yaitu kualitas PJU baik, kualitas PJU menengah, dan kualitas PJU buruk. Untuk kualitas infrastruktur baik berada di Desa Samiran, Desa Selo, Desa Mliwis, Desa Sukabumi, Desa Jelok, dan Desa Winong. Sedangkan untuk kualitas infrastruktur dengan kondisi menengah berada di Desa Mriyan, Desa Sruni, Desa Lanjaran, dan Desa Ringinlarik. Untuk PJU dengan kualitas rendah berada pada Desa Musuk, Desa Pusporenggo, Desa Sukorame, Desa Wonodoyo, Desa Paras, Desa Sambung, dan Desa Gedangan.
- d. Koridor yang memiliki infrastruktur PJU dengan kualitas baik merupakan koridor yang memiliki faktor eksternal yang cukup tinggi. Faktor eksternal tersebut diantaranya adalah Desa Samiran merupakan desa wisata, sehingga dalam penyediaan infrastrukturnya mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah daerah. Selain itu pada koridor dengan PJU kualitas baik dilewati oleh jaringan jalan kolektor yang menghubungkan antar kabupaten sehingga proses penanganan berada di bawah *control* dari pemerintah daerah.

- e. Perbedaan karakteristik infrastruktur PJU dari aspek teknis (aspek fisik dan aspek energi) yang digambarkan melalui perhitungan SPSS cukup jelas, dan ketepatan model diskriminan yang dihasilkan adalah sebesar 82,4 %.
- f. Fungsi diskriminan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS untuk mengetahui fungsi desa dan desa – kota adalah sebagai berikut :

$$\text{Desa} = - 11, 988 - 8, 673 (X1) + 0,332 (X2)$$

$$\text{Desa – Kota} = - 4, 895 - 2, 525 (X1) + 0,139 (X2)$$

Dimana (X1) adalah variabel tingkat luminansi dan (X2) adalah variabel jenis lampu.

- g. Untuk manajemen pengelolaan infrastruktur PJU secara garis besar terbagi menjadi 2 kategori yaitu pengelolaan berbasis masyarakat dan berbasis pemerintah. Untuk penegelolaan berbasis masyarakat dapat terlihat pada desa – desa yang memiliki latar belakang terdampak bencana erupsi pada tahun 2010, sehingga saat ini masyarakatnya lebih meningkatkan kepedulian mereka terhadap infrastruktur di desa. Sedangkan pengelolaan berbasis bantuan dari pemerintah sebagian besar masih di fokuskan pada koridor desa – kota yang mana secara kewenangan masih menjadi kewajiban pemerintah dalam penyediaan infrastruktur terutama infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU).
- h. Pengelolaan Infrastruktur Penerangan Jalan Umum pada koridor desa sangat memegang prinsip PPIP, berbeda dengan penegelolaan infrastruktur penerangan Jalan Umum pada koridor desa – kota sudah mulai bias.
- i. Prinsip dasar PPIP terdiri dari 6 yaitu : partisipasi, *acceptable*, *transparent*, *accountable*, *sustainable*, dan *women empower*. Dari keenam prinsip tersebut, 6 prinsip terpenuhi atau dapat dijumpai pada koridor desa, sedangkan hanya 3 prinsip saja yang dapat dijumpai pada koridor desa – kota.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan setelah melakukan analisis dalam penelitian yang berjudul “Penilaian Infrastruktur PJU Berdasarkan Tipologi Desa – Kota Sebagai Prasarana Pendukung Evakuasi”, yaitu :

- a. Koridor desa yang memiliki kualitas infrastruktur PJU (Penerangan Jalan Umum) tergolong rendah yaitu pada Desa Wonodoyo, Desa Paras, dan Desa Sambung sebaiknya perlu peningkatan bantuan dari pemerintah daerah ataupun pihak luar.
- b. Koridor desa yang memiliki kualitas infrastruktur PJU (Penerangan Jalan Umum) tergolong sedang yaitu pada Desa Wonodoyo, Desa Paras, dan Desa Sambung sebaiknya perlu dipertahankan kualitasnya.

- c. Koridor desa yang memiliki kualitas infrastruktur PJU (Penerangan Jalan Umum) tergolong baik yaitu pada Desa Wonodoyo, Desa Paras, dan Desa Sambung sebaiknya perlu mempertahankan kualitas infrastruktur PJU yang ada.
- d. Peningkatan kualitas infrastruktur PJU (Penerangan Jalan Umum) pada koridor atau rute evakuasi bencana erupsi agar ketika proses evakuasi tidak terjadi gangguan dan dapat meminimalisir kecelakaan ataupun korban jiwa.
- e. Perlunya kerja sama antar desa dalam penyediaan *sister village* saat proses evakuasi dan pasca bencana.
- f. Daerah – daerah di kawasan rawan bencana yang belum memiliki lembaga tingkat desa yang berhubungan dengan kelompok sadar bencana sebaiknya membuat kelompok sadar bencana agar masyarakat menjadi mandiri dan tangguh terhadap bencana.
- g. Selain peningkatan kapasitas masyarakat, perlu adanya peningkatan sinkronisasi antar stakeholder terkait di tingkat daerah seperti pemerintah kabupaten, BPBD, PMI, Polisi, dan Pamong. Hal ini berguna untuk mengurangi resiko terjadinya korban jiwa saat proses evakuasi bencana erupsi sseperti kejadian tahun 2010.
- h. Pentingnya keberadaan infrastruktur PJU (penerangan Jalan Umum) pada kawasan rawan bencana mengharuskan pemerintah melakukan perbaikan dan pembaruan infrastruktur PJU agar dapat meminimalisir kejadian seperti tahun 2010 saat bencana erupsi Gunung Merapi.

Keberadaan program – program infrastruktur yang sifatnya *bottom up* (perlu melibatkan masyarakat) seperti PNPM, PPIP, dsb perlu diperbanyak dan ditingkatkan lagi agar masyarakat di kawasan – kawasan *rural area* menjadi lebih aktif terhadap isu pembangunan infrastruktur di lingkungannya.